



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8).

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU SKPD
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Indikator Kinerja Daerah; dan
 - b. Indikator Kinerja Sasaran Daerah.
- (3) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan format Keputusan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021.
- (3) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. bidang kewenangan, tugas dan fungsi serta peran lainnya;
 - b. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - c. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - d. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan terhadap penyusunan IKU dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.

- (2) Pengawasan penyusunan IKU dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 16 November 2017

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO


Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 16 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (*good governance*) seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran (*no performance, no money*).

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam upaya mewujudkan *good governance dan result oriented government*. Perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja . Dengan demikian perencanaan anggaran yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Situbondo menetapkan IKU dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta mewujudkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

I.2 Maksud dan tujuan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo diharapkan dapat dijadikan pedoman/ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dan seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Situbondo, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para pimpinan SKPD tidak hanya mengelola anggaran saja akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

II.1 Indikator Kinerja Daerah Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Situbondo

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Pengertian
1	2	3	4	
1	Indeks Pembangunan Manusia	%	<p>Dimensi Kesehatan :</p> $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ <p>Dimensi Pendidikan :</p> $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Dimensi Pengeluaran :</p> $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ <p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran :</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$	<p>IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.</p> <p>Kemanfaatan IPM sebagai indikator adalah :</p> <p>a. Indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk);</p> <p>b. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.</p>

2	Persentase Penduduk Miskin	%	<p>Garis Kemiskinan (GK) <u>Rumus Penghitungan :</u> $GK = GKM + GKNM$</p> <p>GK = Garis Kemiskinan GKM = Garis Kemiskinan Makanan GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan</p> <p>Persentase Penduduk Miskin <u>Rumus Penghitungan :</u></p> $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Dimana: $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.</p>	<p>Persentase Penduduk Miskin. Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan.</p> <p>Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan; Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah; Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.
---	----------------------------	---	---	--

3	Pertumbuhan Ekonomi	%	<p>Rumus menghitung pertumbuhan PDRB:</p> $\frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$ <p><i>dimana:</i></p> <p>$t+1$ = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.</p> <p>Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.</p> <p>Penyajian PDRB atas dasar harga konstan mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan.</p>
4	Indeks Gini Ratio	Nilai Koefisien	<p>Rumus menghitung gini ratio :</p> $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$	<p>Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1.</p>

			<p><i>dimana:</i></p> <p>Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:</p> <p>G < 0,3 = ketimpangan rendah</p> <p>0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang</p> <p>G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p>	<p>Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.</p>
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	<p>Rumus menghitung Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) :</p> $\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	<p>Penganggur terbuka adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;

				<p>d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.</p> <p>Indikator ini bermanfaat untuk melihat ketersediaan tenaga kerja dan mengevaluasi struktur ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.</p>
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skala	<p>Rumus menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) :</p> $\text{IKLH} = 30\% \text{ IPA} + 30\% \text{ IPU} + 40\% \text{ ITV}$ <p>dimana:</p> <p>IPA = Indeks Pencemaran Air</p> <p>IPU = Indeks Pencemaran Udara</p> <p>ITV = Indeks Tutupan Vegetasi</p>	<p>Indek kualitas lingkungan hidup adalah parameter kualitas lingkungan di suatu daerah tertentu, indeks ini digunakan untuk mengontrol kualitas lingkungan dan mengendalikan kerusakan dan polusi yang diakibatkan oleh pembangunan yang mengganggu ekosistem lingkungan. Indeks kualitas lingkungan hidup mengambil tiga indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air, kualitas udara, dan tutupan vegetasi.</p>

7	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Juta	<p>Rumus menghitung pertumbuhan PDRB:</p> $\frac{\text{PDRB}_{(t+1)} - \text{PDRB}_{(t)}}{\text{PDRB}_{(t)}} \times 100\%$ <p><i>Dimana:</i></p> <p>$t+1$ = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p>	<p>PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.</p> <p>PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu daerah. adapun cara hitung PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menggunakan pendekatan produksi; 2) menggunakan pendekatan pendapatan; dan 3) menggunakan pendekatan pengeluaran.
8	PDRB Perkapita	Juta	<p>Rumus menghitung PDRB perkapita:</p> $\frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk Pertengahan tahun}}$	<p>Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan regional suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut.</p>

				<p>Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya semakin makmur negara tersebut, PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun.</p>																				
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai/ skala	<p>Indeks yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat, dengan interval nilai</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25,00 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik	<p>Kepuasan masyarakat adalah salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja atau layanan sebuah organisasi</p>
Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																					
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik																					
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																					
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																					
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik																					

II.2 Indikator Sasaran (*Impact*) Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Situbondo

NO				TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1				2	3	4	5	6
MISI 1 : MEWUJUDKAN SDM YANG BERIMAN, BERKUALITAS, BERPRESTASI DAN AKTIF DALAM PEMBANGUNAN								
1	1	1	1	Meningkatkan kualitas keimanan, pendidikan, nilai-nilai budaya pada masyarakat dan pemuda.	Meningkatnya aktifitas keagamaan masyarakat	Persentase fasilitas aktifitas keagamaan masyarakat	Jumlah aktifitas keagamaan yang difasilitasi ----- x 100% Jumlah seluruh aktifitas keagamaan	Bagian Kesra, Sekretariat Daerah
1	1	2	1		Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan formal, informal dan non formal	APK PAUD 4-6 tahun	Jumlah siswa TK/RA pada tempat penitipan anak ----- x 100% Jumlah Seluruh Penduduk Usia 4 – 6 tahun	Dinas Pendidikan
1	1	2	2			APK SD/MI/Paket A	Jumlah Seluruh Murid sedang Sekolah di SD/Sederajat ----- x100% Jumlah Seluruh Penduduk Usia 7 – 12 Tahun	Dinas Pendidikan
1	1	2	3			APK SMP/MTs/Paket B	Jumlah Seluruh Murid sedang Sekolah di SMP/Sederajat ----- x 100% Jumlah Seluruh Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	Dinas Pendidikan

1	1	2	4			APM SD/MI/Paket A	Jumlah Seluruh Murid Usia 7-12 Tahun di SD/Sederajat ----- x 100% Jumlah Seluruh Penduduk Usia 7 – 12 Tahun	Dinas Pendidikan
1	1	2	5			APM SMP/MTs/Paket B	Jumlah Seluruh Murid Usia 13-15 Tahun di SMP/Sederajat ----- x 100% Jumlah Seluruh Penduduk Usia 13 – 15 Tahun	Dinas Pendidikan
1	1	2	6			Angka rata-rata lama sekolah	Jumlah Penduduk 15 keatas yg sedang sekolah / telah berijazah X Lama Pendidikan -----x 100% Jumlah Penduduk 15 keatas yg sedang sekolah / telah berijazah	Dinas Pendidikan
1	1	2	7			Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 59 tahun	Jumlah Seluruh Penduduk Melek Huruf Usia 15 s/d 59 Tahun pada th. n ----- x 100% Jumlah Seluruh Penduduk Usia 15 s/d 59 Tahun	Dinas Pendidikan
1	1	2	8			Angka kelulusan SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI ----- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	Dinas Pendidikan

1	1	2	9			Angka kelulusan SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs ----- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	Dinas Pendidikan
1	1	2	10			Jumlah Lembaga SD yang terakreditasi A	Jumlah SD/MI yang terakreditasi A ----- x 100 % Jumlah seluruh SD/MI	Dinas Pendidikan
1	1	2	11			Jumlah Lembaga SMP yang terakreditasi A	Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi A ----- x 100 % Jumlah seluruh SMP/MTs	Dinas Pendidikan
1	1	2	1		Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	IKM Perpustakaan	Nilai IKM Perpustakaan hasil survey pada tahun n	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	1	3	1		Meningkatnya kualitas dan pelestarian seni budaya lokal	Persentase Seni dan budaya lokal yang diakui tingkat regional	Jumlah seni dan budaya lokal yang Diakui tingkat regional ----- x 100% Jumlah seluruh seni dan budaya lokal	Dinas Pendidikan
1	1	4	1		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olah raga	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Jumlah organisasi pemuda yang aktif ----- x 100% Jumlah organisasi pemuda	Dinas Pariwisata
1	1	4	2			Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Jumlah cabang olah raga yang berprestasi ----- x 100% Jumlah cabang olah raga	Dinas Pariwisata

MISI 2 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG STABIL DAN DINAMIS BERBASIS POTENSI LOKAL								
2	1	1	1	Meningkatkan daya saing pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta ketahanan pangan.	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian	Produksi Pertanian per Komoditas	Jumlah produksi pertanian per komoditas = Produktifitas x luas panen	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2	1	2	1		Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan	Produksi Perkebunan	Jumlah Produksi Perkebunan pada tahun n	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
2	1	3	1		Meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan	Populasi Ternak	Jumlah Produksi Peternakan pada tahun n	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	1	4	1		Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan dan kelautan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada tahun n	Dinas Perikanan
2	1	4	2			Jumlah produksi perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya pada tahun n	Dinas Perikanan
2	1	4	3			Jumlah produksi olahan	Jumlah Produksi Olahan pada tahun n	Dinas Perikanan

2	1	5	1		Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat (food availability)	1. Angka Pola Pangan Harapan	<p>Nilai cap. Peningkatan skor PPH = %AKG x bobot masing-masing kelompok pangan</p> <p>Persentase AKG = $\frac{\text{Energi masing-masing komoditas}}{\text{Angka kecukupan gizi}} \times 100\%$</p>	Dinas Ketahanan Pangan
2	1	5	2			2. Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	<p>Rata2 jumlah stock pangan (beras) per tahun (kg)</p> <p>$\frac{\text{Jumlah penduduk}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$</p>	Dinas Ketahanan Pangan
2	2	6	1	Mengembangkan Industri pariwisata dan ekonomi produktif dan kreatif lainnya	Meningkatnya daya saing usaha pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah wisatawan pada tahun n	Dinas Pariwisata
2	2	6	2			Persentase Destinasi wisata baru yang terintegrasi	<p>Jumlah destinasi wisata baru yang terintegrasi</p> <p>$\frac{\text{Jumlah destinasi wisata baru}}{\text{Jumlah destinasi wisata baru}} \times 100\%$</p>	Dinas Pariwisata
2	2	7	1		Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian	Persentase Pertumbuhan Industri	<p>Jumlah industri tahun (n) - Jumlah industri tahun (n-1)</p> <p>$\frac{\text{Jumlah industri sampai dengan tahun (n)}}{\text{Jumlah industri sampai dengan tahun (n)}} \times 100\%$</p>	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

2	2	8	1		Meningkatnya kualitas koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah koperasi aktif ----- x 100% Jumlah koperasi yang terdata	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2	2	8	2			Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha mikro pada tahun n	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2	2	9	1		Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap pembangunan	Nilai Ekspor bersih perdagangan	Jumlah ekspor bersih perdagangan pada tahun n	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP YANG SEHAT, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN								
3	1	1	1	Meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan sosial, partisipasi angkatan kerja serta pemberdayaan perempuan	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka kematian Ibu (AKI)	Banyaknya Kematian Ibu saat hamil, melahirkan dan nifas) pada th. n ----- x 100.000 Jumlah kelahiran hidup pada th. n	Dinas Kesehatan
3	1	1	2			Angka kematian Bayi (AKB)	Banyaknya Kematian Bayi (dibawah 1 Tahun) -----x1.000 Banyaknya Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan
3	1	1	3			Angka Prevalensi Gizi Buruk	Jumlah balita gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x 100% Jumlah balita yang diukur di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Dinas Kesehatan

3	1	1	4			IKM Pelayanan Kesehatan	Nilai IKM pelayanan Kesehatan (akumulatif) hasil survey pada tahun n	Dinas Kesehatan
3	1	2	1		Meningkatnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Angka Laju Pertumbuhan penduduk	Jumlah penduduk pada tahun n -----x jangka waktu Jumlah penduduk pada tahun dasar	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	1	3	1		Meningkatnya layanan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial pada tahun n	Dinas Sosial
3	1	4	1		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan menurunnya angka pengangguran	Persentase Pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan ----- x 100% Jumlah pencari kerja yang mendaftar	Dinas Tenaga Kerja
3	1	4	2			Persentase Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Jumlah sengketa pengusaha - pekerja ----- x 1.000 Jumlah perusahaan	Dinas Tenaga Kerja
3	1	5	1		Meningkatnya kualitas pelayanan Transmigrasi	Jumlah Transmigran terlatih yang ditempatkan	Jumlah transmigran terlatih yang ditempat	Dinas Tenaga Kerja

3	1	6	1		Menurunnya Jumlah Desa Yang Berstatus Kurang Berkembang	Jumlah Desa Yang Berstatus Kurang Berkembang	Jumlah desa yang berstatus kurang berkembang pada tahun n	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	1	7	1		Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak	Rasio KDRT	Jumlah KDRT -----x 1000 Jumlah Rumah Tangga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	1	7	2			Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan ----- x 100% Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
MISI 4 : MEMANTAPKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PEMENUHAN HAK DASAR YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN								
4	1	1	1	Meningkatkan kualitas penataan ruang, infrastruktur, jasa pelayanan perhubungan dan komunikasi, serta lingkungan hidup.	Meningkatnya ketaatan terhadap peruntukan tata ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Realisasi RTRW ----- x 100% Rencana Peruntukan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4	1	1	2			Prosentase Drainase dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat /pembuangan air (km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di Kabupaten (km)}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	1	2	1		Meningkatnya Pencapaian Sasaran Pembangunan Perumahan dan Permukiman	Persentase pemeliharaan saluran drainase di kawasan permukiman	$\frac{\text{Jumlah jaringan perpipaan air bersih}}{\text{Jumlah jaringan air keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	1	2	2			Persentase masyarakat yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)}}{\text{Jumlah masyarakat keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	1	3	1		Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan Kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	1	4	1		Meningkatnya pemenuhan infrakstruktur jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Jumlah jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik pada tahun n}}{\text{Total Jaringan Irigasi}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	1	5	1		Meningkatnya jasa pelayanan perhubungan	IKM Perhubungan	Nilai IKM Perhubungan hasil survey pada tahun n	Dinas Perhubungan

4	1	5	2			Jumlah Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Target perolehan predikat WTN	Dinas Perhubungan
4	1	6	1		Meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi	Persentase instansi dan fasilitas publik yang terkoneksi dengan pusat data.	Jumlah instansi dan fasilitas publik yang terkoneksi dengan pusat data ----- x 100% Jumlah instansi dan fasilitas publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
4	1	7	1		Peningkatan pelestarian lingkungan hidup	1. Indeks Pencemaran Air	$IPA = I_i + I_j + I_k + I_m$ <p> I_i = Nilai Indeks untuk status mutu "Memenuhi" I_j = Nilai Indeks untuk status "Cemar Ringan" I_k = Nilai Indeks untuk status mutu "Cemar Sedang" I_m = Nilai Indeks untuk status "Cemar Berat" </p>	Dinas Lingkungan Hidup
4	1	7	2			2. Indeks Pencemaran Udara	$IPU = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{3}$ <p>a = nilai rata-rata SO₂ atau NO₂ 1 lokasi sampling</p>	Dinas Lingkungan Hidup

4	1	7	3			3. Indeks Tutupan Vegetasi	$\text{ITV} = \frac{\text{Luas Tutupan Vegetasi}}{\text{Luas Wilayah Administrasi}}$	Dinas Lingkungan Hidup
4	1	7	4			4. Persentase Timbulan Sampah yang tertangani	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup
MISI 5 : MENINGKATKAN TATA KELOLA YANG BAIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN								
5	1	1	1	Meningkatkan kualitas aparatur, pelayanan publik, dan keamanan serta ketertiban masyarakat.	Meningkatnya aparatur kompeten, profesional, dan berkinerja tinggi	Persentase Pegawai ASN yang ditetapkan sesuai kebutuhan dan kompetensi	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai dengan anjab/ ABK}}{\text{Jumlah seluruh pegawai}} \times 100\%$	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	1	2	1		Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kinerja birokrasi	Capaian Nilai Sakip Kabupaten	Nilai hasil evaluasi SAKIP tahun n	Bagian Organisasi; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Inspektorat
5	1	3	1		Terwujudnya tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang baik, transparan dan	Kategori Evaluasi LPPD/EKPPD Kabupaten Situbondo	Kategori evaluasi LPPD/EKPPD pada tahun n-1	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

					akuntabel			
5	1	4	1		Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Nilai Opini Laporan Keuangan oleh BPK	Nilai Opini Laporan Keuangan Daerah oleh BPK pada tahun n	Inspektorat dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	1	4	2			Persentase Penerimaan pajak dan retribusi daerah	Jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun n ----- x 100% Jumlah target penerimaan pajak tahun n	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	1	5	1		Meningkatnya akuntabilitas aparatur pemerintah	Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Jumlah Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti pada th. n ----- x 100% Jumlah rekomendasi yang terbit th.n	Inspektorat
5	1	6	1		Meningkatnya tata kelola kearsipan pemerintah	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	1	7	1		Meningkatnya Konsistensi Program antar dokumen Perencanaan	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah program RKPD tahun berkenaan ----- x 100% Jumlah program RPJMD tahun berkenaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5	1	8	1		Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	$\frac{\text{Jumlah data dan informasi yang tersedia pada SIPD}}{\text{Jumlah elemen data pada SIPD}} \times 100\%$	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
5	1	9	1		Meningkatnya Kualitas Kajian Penelitian dan pengembangan untuk mencukupi Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Prosentase data penelitian yang direkomendasi	$\frac{\text{Jumlah data penelitian yang direkomendasi}}{\text{Jumlah keseluruhan data penelitian yang ada}} \times 100\%$	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	10	1		Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian, pembangunan dan ekonomi kerakyatan	Persentase ketertiban penyerapan anggaran kabupaten per triwulan	$\frac{\text{Jumlah triwulan dalam satu tahun yang tertib penyerapan anggaran kasnya minimal 70% dari pagu anggaran kas per triwulan}}{\text{Jumlah triwulan dalam satu tahun}} \times 100\%$	Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah
5	1	11	1		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan	Nilai IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan hasil survey pada tahun n	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5	1	12	1		Meningkatnya kualitas layanan perijinan terpadu	IKM Pelayanan Terpadu	Nilai IKM Pelayanan Terpadu hasil survey pada tahun n	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	1	13	1		Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	Persentase Aspirasi / pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ----- x 100% Jumlah pengaduan masyarakat	Sekretariat DPRD
5	1	13	2			Persentase Produk Hukum yang ditetapkan oleh DPRD	Jumlah Produk hukum yang ditetapkan oleh DPRD -----x 100% Jumlah Raperda yang diusulkan	Sekretariat DPRD
5	1	14	1		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan hasil survey pada tahun n	Kecamatan
5	1	15	1		Meningkatnya Inovasi pelayanan publik	Persentase PD dan UPP yang memiliki Inovasi pelayanan Publik	Jumlah Perangkat Daerah dan UPP yang memiliki inovasi pelayanan publik ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah dan UPP	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah
5	1	16	1		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah pelanggaran peraturan daerah yang ditindak ----- x 100% Jumlah pelanggaran Peraturan	Satuan Polisi Pamong Praja

						Daerah		
5	1	17	1		Meningkatnya ketentraman kehidupan bermasyarakat	Persentase Kejadian Instabilitas Kehidupan bermasyarakat yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah kejadian instabilitas yang tertangani}}{\text{Jumlah kejadian instabilitas daerah}} \times 100 \%$	Satuan Polisi Pamong Praja
5	1	18	1		Meningkatnya layanan penanggulangan bencana	Persentase Korban bencana yang tertangani secara cepat dan tepat sasaran	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang tertangani secara cepat dan tepat}}{\text{Jumlah seluruh korban bencana}} \times 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**III. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA (...nama SKPD...) KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 188/...../KODE SKPD/20...

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PADA (...nama SKPD.....) KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA (...nama SKPD....) KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada (...nama SKPD...) Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala (nama SKPD) Kabupaten Situbondo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada (...nama SKPD...) Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...nama SKPD...) Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama SKPD...) Kabupaten Situbondo.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal

**KEPALA (...nama SKPD)
KABUPATEN SITUBONDO,**

(Nama Lengkap tanpa gelar)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr.;
2. Sdr.;
3. dst. _____

LAMPIRAN Keputusan Kepala (nama SKPD)
 Tanggal :
 Nomor : 188/ /kode skpd/2016

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA (nama SKPD)
 KABUPATEN SITUBONDO**

Nama SKPD:

Tugas :

Fungsi : 1.

2. dst

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA
	SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DIACU			
1					
2					
dst					

**KEPALA (...NAMA SKPD)
 KABUPATEN SITUBONDO**

(Nama Lengkap tanpa gelar)

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO